



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ALUE DOHONG**
2. Jabatan : **WAKIL MENTERI**
3. NHK : **211773**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.689.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 840 m2/242 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.627.500.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 131.250.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 262.500.000
5. Tanah Seluas 1740 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000
6. Tanah Seluas 1600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 715.000.000
7. Tanah Seluas 882 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
8. Tanah Seluas 585 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 472.500.000
9. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 185.750.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/80 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.675.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 61.850.000**



1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI
Rp. 600.000
2. MOBIL, NISSAN TERRANO MINIBUS Tahun 2006, HASIL
SENDIRI Rp. 60.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 1.250.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	349.940.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	278.115.955
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	7.379.405.955
III. HUTANG	Rp.	2.458.997
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.376.946.958

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.